**TANGGUNG JAWAB BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Sarah Nanda Jelita

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., MH

Alamat : Jl. Kembang Selasih, Gobah, Pekanbaru

Email : sarahnandajeli@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the responsibility of the regional revenue agency in the implementation of increasing regional income based on the local regulation of the Kampar Regency number 10 of 2011 concerning the swallow's nest tax in the Kampar Regency. Article 2 paragraph (5) states that the taxpayer of swallow's nest tax is an individual or entity that makes efforts to collect and/or certify swallow's nests. And the basis for the imposition of a bird's nest tax is the selling value of a swallow's nest. However, what is in the field shows that the implementation of regional regulations is not going well.

The type of legal research used by the author is a sociological legal research type. This research was conducted in Kampar Regency. Sociological legal research uses primary data and secondary data, while the population and sample are parties related to the problem studied, namely the Kampar Regency Regional Revenue Agency, the Kampar Regency House of Representatives and the owner of swallow's nest in Kampar Regency. Data collection techniques in this study with literature review, interviews and questionnaires.

From the results of this study, the author concludes that the Kampar district regulation number 10 of 2011 has not been implemented properly, because the new local regulation was implemented in 2019 even though the Kampar district regulation which regulates the swallow's nest tax has long been ratified, the obstacle to implementing local regulations is the weakness supervision from the government, late in making regent regulations, not yet bringing in potential taxes, and lack of public awareness of paying taxes.

Keywords: Government - local regulation - swallow's nest tax

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Riau yang mengolah dan menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat menerima Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah melalui Pajak Daerah, salah satu sumber pendapatan asli Daerah Kabupaten Kampar yaitu Pajak Sarang Burung Walet, dimana saat ini banyak masyarakat menggeluti usaha budidaya burung walet bahkan sebagian berada di lingkungan masyarakat, tetapi semakin maraknya usaha penangkaran walet yang berada di lingkungan masyarakat terkesan tidak beraturan dan usaha sarang burung walet banyak tidak dipungut pajaknya.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, karena itu di kabupaten Kampar usaha sarang burung walet banyak diminati, dikarenakan dalam mengusahakan sarang burung walet menjanjikan atau sangat menguntungkan bagi para pengelola usaha sarang burung walet tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik sarang burung walet di kabupaten Kampar desa pulau tinggi mengatakan hasil yang didapatkannya dari usaha tersebut menguntungkan, terkadang 1 bulan panen bisa mendapatkan 2 kg dari dua rukonya yang sudah berdiri selama 6 Tahun yang dimana harga jual sarang burung walet berkisar 14.000.000,00. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet kabupaten Kampar, dalam peraturan ini diatur setiap pelaku usaha / pengusaha sarang burung walet harus dikenakan pajak yang dimana akan menjadi sumber pendapatan pendapatan asli daerah.

Pajak yang diambil dari sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan

pajak sarang burung walet tersebut berdasarkan nilai jual sarang burung walet tersebut dan dikenakan Tarif Pajak sebesar 5% , sebagai contohnya pemilik sarang burung walet perbulan mendapatkan 2 kg di jual dengan harga pasaran Rp. 12.000.000 x 2 = 24.000.000 x 5% = Rp. 1.200.000 jadi wajib pajaknya 1.200.000, Dalam pasal 2 angka (5) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Artinya bahwa pemilik sarang burung walet di kabupaten Kampar mempunyai kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bapak Zamhur, ST menyatakan bahwasanya perda pajak sarang burung walet belum terlaksana dengan maksimal karena belum adanya kesadaran masyarakat membayar pajak dan belum terlalu potensi untuk mendatangkan pendapatan daerah.¹ Tetapi data diatas menunjukkan bahwa banyak para pemilik atau yang mengusahakan sarang burung walet , secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan pelaksanaan tugas badan pendapatan daerah penting dilakukan agar tercapainya pemasukan pendapatan asli daerah dan perlunya fungsi pengawasan dari DPRD Kabupaten Kampar dalam menjalankan peraturan daerah yang tidak terlaksana dan kinerja dari Bapenda kabupaten Kampar

Sebelumnya judul skripsi terkait pajak sarang burung walet tersebut sudah pernah diangkat oleh salah satu alumni Universitas Riau Fakultas ilmu sosial dan politik yang berjudul “pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Indragiri Hilir”, dan satu alumni

¹ berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamhur, S, Sekeretari Badan pendapatan daerah kabupaten Kampar, Hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar.

Universitas Riau Fakultas Hukum yang berjudul “penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru², penulis memiliki perbedaan penelitian dengan judul penelitian tersebut baik dari rumusan masalah, locus penelitian. Dan penulis meneliti Tanggung Jawab badan pendapatan daerah terkait peningkatan pendapatan daerah tentang pajak sarang burung walet di kabupaten kampar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **“Tanggung Jawab Badan pendapatan Daerah kampar dalam Implementasi Peningkatan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Mengapa Peraturan Daerah kabupaten kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar tidak Terlaksana?
2. Bagaimana Upaya yang seharusnya dilakukan oleh badan pendapatan daerah agar pendapatan daerah kampar dari pajak sarang burung walet dapat di pungut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui terlaksana peraturan daerah kabupaten kampar nomor 10 Tahun 2011

tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar.

- 2) Untuk upaya yang seharusnya dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kampar agar pendapatan daerah kampar dari pajak sarang burung walet dapat di pungut

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah fakultas Hukum Universitas Riau
- c. Bagi instansi yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peran badan pendapatan daerah kabupaten kampar dalam meningkatkan pendapatan daerah.

D. Kerangka Teori

1. Teori pengawasan

Mengenai istilah pengawasan, George R. Terry menyatakan sebagai *“control is to accomplished evaluate it, and apply corrective meansures, if need to insure resyrt in keeping with the plan”*.³ Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian, tindakan pengawasan ini tidak diletakkan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang dilakukan tetapi justru pada akhirnya suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut melahirkan sesuatu.⁴

³ Mucsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.36.

⁴ Muchson, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.36.

² Felix Alfred Napitupulu, “penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru, 2017

Hendry fayol menyebutkan bahwa *“control consist in veryvying accur in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles estabilished. It has for object to point out weaknes and errors in order to rectivythen and prevent recurrence”*.⁵

Pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai dan (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditentukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya dimana kesalahan-kesalahan yang akhirnya dimana kesalahan akan diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Sedangkan Sarwato menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manejer yang mengusahkan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksanan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁶ Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.⁷ Hal ini menjadi persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan dan pembatasan terhadap pemerintah⁸. Keabsahan aparat pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat.⁹

⁵ *Ibid*, hlm.37.

⁶ Sarwato, Dasar-dasar organisasi Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta,2010,hlm.94.

⁷ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.447.

⁸ “Leiden Journal of International Law”2010, by Hannah Arendt, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka/#>, pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

⁹ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.225

2. Teori Keuangan Negara

Negara sebagai badan hukum publik, memiliki fungsi yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi itu berupa (1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak dapat terlaksana bila tidak ditopang dengan keuangan negara sebagai pembiayaannya. Dengan demikian, keuangan negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah.¹⁰

Ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian keuangan negara menurut para ahli di bidang keuangan negara.

- a. Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kuantitatif(dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan di jalankan untuk masa mendatang , lazimnya satu tahun mendatang
- b. Menurut Otto Ekstein, keuangan negara adalah suatu pernyataan rinci tentang pengeluaran dan penerimaan untuk waktu satu tahun.¹¹

Jadi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.9

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.1-2

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹²

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengembalian keputusan hingga pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Luasnya bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal 1, subbidang pengelolaan moneter dan subbidang kekayaan negara yang dipisahkan.¹³

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.¹⁴ Maka dari pada itu, peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵
2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang disahkan.¹⁶

¹² Dadang Sohilin, *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat Dan Daerah*, PT Artifa Duta Prakarsa, Jakarta, 2006. hlm.1

¹³ Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 21-22

¹⁴ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm.132.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁶ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.21

3. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

4. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau mengusahkan sarang burung walet.¹⁸

5. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collece*, yaitu *collecelia fuchliap haga*, *collecelia maxina*, *collecelia esculanta*, dan *collecelia linchi*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di kabupaten kampar..

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi orang benda maupun objek lainnya.

b. Sampel

Peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara di

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

¹⁸ Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengelolaan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.

Pajak adalah pungutan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak tanpa tegenprestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana tersirat dalam pasal 23A UUD 1945. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah memaksa yang terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi pajak tersebut terdapat unsur-unsur penegertian pajak, antara lain:

- a. Adanya iuran wajib pajak dari rakyat kepada pemerintah (negara)
- b. Dipungut (dipaksakan) berdasarkan undang-undang

- c. Tanpa adanya kontraprestasi langsung secara individual
- d. Untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan umum¹⁹.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyebutkan ‘pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum’.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peratutan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,²⁰ Guna pajak ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pemabayaran pajak, tidak langsung diperoleh dari pemerintah.²¹

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Fungsi pemungutan pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:²²

a. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur

¹⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.276.

²⁰ Erly Suandy, *Perpajakan Dilegkapi Latihan Soal*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.3.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.324.

²² Angger Sigit Pramukti dan fuady Primaharsya, *pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015, hlm. 32-34

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemunggutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan pula dapat dibedakan, berdasarkan kewenangan pemungutannya.²³

1. Dari segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari segi administratif yuridis akan menghasilkan yang sering dikenal dengan pajak langsung dan tidak langsung

2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

3. Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak dengan mendasarkan sifatnya ini akan memunculkan yang disebut pajak bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*zakelijk*).

4. Berdasarkan Kewenangan Pemunggutan

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemunggutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah)

5. Sistem Pemunggutan Pajak

a) *Official assesment system*, adalah sistem pemunggutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

b) *Self assesment syestem*, adalah pemungutan pajak memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) *With holding syestem*, adalah pemunggutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.²⁴

4. Pajak Daerah

Pajak Yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.²⁵

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah "Kontribusi wajib kepada Daerah Yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

²⁴ Umar Said Sugiarto, *Op.cit*, hlm.283.

²⁵ Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, CV Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru, 2007, hlm.73.

²³ Sri Pundyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 9-16

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemunggutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah.²⁶

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang tersebut diatas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yang berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentaraman dan kesetabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat;
- 5) Potensinya memadai, yang berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa

pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangu arus sumberdaya ekonomi antar-Daerah maupun kegiatan ekspor impor;

- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- 8) Menjaga kelestarian Lingkungan, yaitu bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan.²⁷

5. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Perda No 10 tahun 2011 Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *colloce*, yaitu *collocelia fuchliap* haga, *collocelia maxina*, *collocelia esculanta*, dan *collocelia linchi*.

Dengan dasar pengenaan dan tarif pajak sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran yang berlaku di wilayah tersebut dengan volume produksi;
- b. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

²⁶ Sri Arnetti, Darnis, Egi Valia, “Pelaaksanaan Pungutan Pajak Galian C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1 September-Januari 2014, hlm. 3.

²⁷ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Op.cit*, hlm. 268-269.

²⁸ Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang, 2019, hlm.58-68

sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada dasarnya hukum keuangan negara harus diletakkan pada konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang membawa implikasi yuridis yang cukup signifikan dalam sistem ketetapan Indonesia.²⁹

Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari “kata awas”, artinya “Penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu

dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.³⁰

Sebagai salah satu fungsi dalam manajemen, pengawasan tidak dapat dihilangkan dalam setiap sistem organisasi disebabkan merupakan lingkaran manajemen yang saling berkaitan. Setiap pimpinan organisasi, baik formal maupun informal, harus menjalankan fungsi pengawasan demi keberhasilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.³¹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 10104'30" Bujur Timur. Batas-batas kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

2. Demografi

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Kampar yaitu 371 jiwa/Km², diikuti oleh kecamatan Bangkinang Kota yaitu 225 jiwa/Km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu kecamatan

²⁹ Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16.

³⁰ Ni Matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 101-104.

³¹ Hari Sabarno, *Op.cit.*, hlm. 48.

Kampar Kiri Hulu 10 jiwa/Km² dan Kampar Kiri Hilir 16 jiwa/Km².

3. Pemerintahan

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 bersarkan UU No. 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya kabupaten kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua pembantu bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1989.

4. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Kampar Untuk Lebih Memajukan Kabupaten Kampar yaitu.;

- a. Mewujudkan Pembangunan nilai budaya masyarakat kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global
- b. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan

B. Gambaran Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan sub Direktorat pada direktorat keuangan daerah kotamadya daerah bangkinang . Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 september 1975 tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya daerah Bangkinang dengan perda Nomor 5 tahun 1976.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas

2. Mengembangkan dan megoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

C. Gambaran Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD terdiri dari atas DPRD Provinsi untuk wilayah Provinsi, DPRD Kabupaten untuk wilayah kabupaten, dan DPRD kota untuk wilayah kota.³²

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah kabupaten kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar tidak Terlaksana

a. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar Tidak Terlaksana.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.³³ Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.³⁴ Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan

³² Andi Pangerang Moenta dan Syafat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.26.

³³ Harun Hamrolie H, *Loc.cit.*

³⁴ Mardiasmo, *Loc.cit.*

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem. Tujuan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. sehingga memberi peluang kepada daerah memberikan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah sudah diberikan kewenangan untuk memunggut jenis pajak provinsi maupun jenis pajak kabupaten, yang salah satunya Pajak sarang burung walet. Sehingga lahir peraturan daerah yang mengatur pajak, Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah.³⁵ Perda produk hukum dibuat dan didesain oleh dua badan politik, yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan daerah,³⁶ salah satu jenis pajak yang dipungut di kabupaten Kampar yaitu pajak sarang burung walet, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, sehingga diharapkan melalui peraturan daerah ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet sudah lama dibentuk/disahkan mulai dari tahun 2011, dengan jangka waktu selama 9 Tahun, tetapi selama ini pemerintah kabupaten kampar tidak melaksanakan pemunggutan pajak, sehingga pemasukkan dari pajak sarang burung walet hilang dan tidak menjadi

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan pemerintah Kabupaten Kampar baru melakukan pemunggutan pajak yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 jumlah keseluruhan usaha sarang burung walet yang berada di kabupaten kampar ada sekitar 1.250 baik yang aktif maupun tidak aktif. Pemunggutan pajak dan di kelola oleh Badan Pendapatann Daerah Kabupaten Kampar. dengan tetapi pemerintah kabupaten kampar lalai dalam melakukan pemunggutan pajak padahal banyak yang mengusahakan usaha sarang burung walet di kabupaten kampar salah satunya di kecamatan Siak Hulu terdapat 172 yang mengusahakan sarang burung walet.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zamfur, ST sebagai sekretaris Bapenda, menyebutkan bahwasan peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet sudah lama disahkan dari tahun 2011 dengan rentang waktu 9 Tahun tetapi selama ini pajak sarang burung walet tidak di laksanakan dikarenakan belum terlalu potensi mendatangkan pendapatan bagi daerah, sehingga tidak dilaksanakannya pemunggutan pajak.

Dan untuk melakukan pemunggutan pajak harus dilakukan secara teknis yaitu harus adanya peraturan bupati tentang tata cara pemunggutan pajak sarang burung walet baru bisa dilakukan pemunggutan pajak, tetapi peraturan bupati tidak menjadi kendala dalam menjalankan perda saat melakukan wawancara dari pihak bapenda kabupaten kampar.

Saat penulis melakukan wawancara kepada salah satu pemilik sarang burung walet, Ibu Ranita mengatakan “ bahwa tidak pernah mendengar adanya sosialisasi terkait pajak sarang burung walet di desanya”.³⁷

³⁵ Hartiwiningsih, *Loc.cit.*

³⁶ josef Mario Monteiro, *Loc.cit.*

³⁷ wawancara dengan Ibu Ranita, Pemilik Sarang Burung Walet, Hari Senin, Tanggal 15 Maret, Bertempat Di Rumah Ibu Ranita.

Sehingga masih banyak para pengusaha/pemilik tidak mengetahui jika sarang burung walet dikenakan pajak, jika kita melihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa pihak badan pendapatan daerah belum sepenuhnya/ belum merata melakukan sosialisasi kepada para pengusaha sarang burung walet yang ada di setiap kecamatan.

Saat penulis melakukan wawancara juga dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, mengatakan Bahwasanya pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik/ pengusaha sarang burung walet di setiap kecamatan walaupun belum secara merata dan mereka baru melakukan sosialisasi pada tahun 2019, padahal perda pajak sarang burung walet ini sudah lama dibuat.

Adapun cara menghitung pajak sarang burung walet yaitu besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak (harga pasaran umum sarang burung walet). Saat wawancara dengan salah pemilik sarang burung walet mengatakan bahwasanya harga jual hasil sarang brung waletnya berkisar 14.000.000 .

Saat melakukan Wawancara dengan Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai izin usaha , mengatakan bahwa para pemilik usaha sarang burung di wilayah kabupaten kampar belum sama sekali memiliki izin usaha, tetapi pajak diambil bukan karna dari berizin maupun tidak berizin tetapi yang diambil dari dampak ekonominya yang ditimbulkan keuntungan dari usaha yang dilakukan.³⁸ mereka mengenaikannya, tetapi izin usaha yang tidak di daftarkan pemilik sarang burung walet dapat didaftarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar hal ini dimuat dalam Perbub Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang berbunyi “Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar akan mendaftarkan usaha wajib pajak.

Ketidakhahaman dan kurangnya kesadaran wajib pajak adalah salah satu kendala tidak terlaksananya perda nomor 10 tahun 2011, hal ini dibuktikan saat penulis melakukan menyebarkan kuisioner dengan beberapa responden, rata-rata responden tidak mengetahui jika adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet, dimana jika melakukan usaha sarang burung walet dikenakan pajak dengan Tarif 5% dengan nilai jual sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.

Bila dikaitan dengan Teori Pengawasan, pada intinya merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar-benar telah dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud. Pengawasan di perlukan dalam pemungutan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Kampar yaitu pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak, melakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang meliputi penerimaan/penyetoran Pajak. Pengawasan diperlukan dalam hal melakukan pendataan dan pemungutan pajak itu sendiri.

Dan pengawasan dari DPRD kabupaten kampar terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kinerja BAPENDA Kampar sangat diperlukan , saat melakukan Wawancara dengan Ketua Komisi III bidang Keuangan dan Perekonomian bapak Zulpan Azmi, ST, MT mengatakan bahwa DPRD memiliki 3 (Tiga) tugas yaitu, membuat peraturan Daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan di bidang

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamhur, S.T, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

anggaran (budgeting) dan pengawasan / monitoring terhadap peraturan daerah, pihak DPRD sudah melakukan pengawasan terhadap Perda Tetapi belum menjalankan secara maksimal tugasnya terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, , berkaitan dengan kinerja bapenda pengawasan memiliki peran penting di dalam menjalankan suatu peraturan, agar peraturan dapat berjalan dengan baik.

Tetapi pada kenyataannya Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan sepenuhnya Fungsi pengawasan. Sehingga perda pajak sarang burung walet yang sudah diundangkan selama 9 tahun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagi Pemerintah daerah kabupaten kampar menilai jika pajak sarang burung walet belum mampu mendatangkan pendapatan bagi daerah. tetapi penulis melihat data yang ada sekitar 1.250 pemilik sarang burung walet tersebut,tersebar di wilayah kabupaten kampar bahwa pajak sarang burung walet bisa mendatangkan potensi bagi pedapatan daerah.

Jadi penulis menyarankan perlunya kerjasama antara pihak DPRD kabupaten Kampar dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menjalankan Pengawasan Pelaksanaan Pajak sarang Burung Walet sungguh-sungguh, sehingga tidak ada Lagi Perda yang tidak terlaksana di Kabupaten Kampar.

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Agar Pendapatan Daerah Kampar Dari Pajak Sarang Burung Walet Dapat Meningkatkan

Adapun upaya yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan meningkatkan pendapatan daerah di kabupaten kampar yaitu;

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu baru melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang

kewajiban taat pajak, agar masyarakat membayar pajak sarang burung, tetapi kenyataannya belum sepenuhnya/ merata melakukan sosialisasi kepada wajib pajak/pemilik sarang burung walet.

2. Menambah Para Petugas Pengawasan dan Pendataan

Saat melakukan wawancara dengan Bapak Zamfhur, ST, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, mengatakan bahwasannya dalam melakukan pemunggutan pajak dan pengawasan baik dari pajak sarang burung walet maupun pajak dan retribusi lain pihak Badan Pendapatan Daerah kekurangan petugas. Sehingga belum optimal dalam melakukan pengawasan maupun pemunggutan pajak, sehingga Pihak Bapenda Berencana Akan menambah Petugas.

Dalam hal ini pemerintah juga perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor sarang burung walet dengan melakukan perubahan dan penyempurnan di bidang keuangan daerah dengan melakukan inovasi agar wajib pajak taat membayar pajak.

Jika dihubungkan dengan Teori Keuangan Negara, Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, Pajak yang di punggut oleh pemerintah menjadi sumber keuangan negara dengan adanya pajak, digunakan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran negara dalam proses pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan bagi negara diperoleh dari di punggut pajak meyumbang sekitar 70% , dari seluruh penerimaan negara. sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara.

Tetapi pada kenyataan nya pemerintah daerah kabupaten kampar lalai dan tidak serius menjalankan Tugasnya, sehingga Pemasukkan

Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet tidak Ada padahal perda pajak sarang burung walet sudah di undangkan mulai dari tahun 2011 sehingga berapa banyak hilangnya Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Perpajakan. Disini Perlunya perhatian dan kerjasamanya dari pemerintah daerah untuk lebih Serius menjalankannya karena Pajak merupakan salah satu Sektor Penyumbang Terbesar dalam Pembangunan Daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada Bab IV, Maka dapat di ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang Burung Walet tidak Terlaksana, hal ini di karenakan lalainya pemerintah dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak dan evaluasi terhadap peraturan daerah pajak sarang burung walet, sehingga tidak dapat menjadi Pendapatan bagi daerah dari pajak sarang burung walet untuk Pendapatan Asli Daerah. Dan terdapat juga kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak di kabupaten kampar.
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Agar Pendapatan Daerah Kampar Dari Pajak Sarang Burung Walet Dapat Meningkatkan yaitu melakukan pengawasan dan melakukan Sosialisasi Kepada wajib pajak dan Menambah Para Petugas Pengawasan dan Pendataan tetapi kenyataan nya belum sepenuhnya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak/ pemilik sarang burung walet di kabupaten kampar.

B. Saran

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Kampar diharapkan lebih serius melakukan pengawasan dan berperan aktif melakukan pendataan dan pembinaan bagi wajib pajak, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar lebih aktif memberikan sosialisasi kepada para pengusaha sarang burung walet mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar, Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara di Kantor Pemerintahan tetapi juga melalui media sosial maupun internet. Agar terciptanya ketertiban serta pemahaman kewajiban membayar pajak bagi para wajib pajak/ pemilik sarang burung walet mengingat pentingnya hasil pajak untuk kesejahteraan rakyat.

2. Penulis menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kampar lebih tegas dalam melakukan pemungutan terhadap pemilik sarang burung walet/ wajib pajak dan dengan dilakukannya penegakkan hukum terkait Sanksi Administrasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Pasal 28, bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.
3. Penulis Menyarankan Perlunya dari DPRD Kabupaten Kampar Agar Lebih serius melakukan pengawasan yang jelas dan melakukan evaluasi perda yang belum berjalan dengan maksimal dan melakukan monitoring kinerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sehingga tidak terjadi lagi Perda yang telah disahkan tidak dilaksanakan dengan Rentang Waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddigie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konklidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Anggara, Sahya, 2016, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung,
- Azahari, 2007, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, CV Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru,

Atmasudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta.

Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, 1995, Pengawasan Keuangan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bratakusumah, supriady, Deddy, dan Dadang, Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT SUN jakarta, Jakarta.

Moeteiro, Mario Josef, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Mucsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

Pangerang Moenta, Pangerang Andi dan Syafat Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Peneelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sarwanto, 2010, *Dasar-dasar Organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta

Tjandra, Riawan, W, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

B. Jurnal dan Skripsi

“Leiden Journal of International Law” 2010, by Hannah Arendt, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui [http:// fh.unri.ac.id/](http://fh.unri.ac.id/), pada tanggal 6

Agustus 2020 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Pamela Coyle, Rights or Responsibilities?”, Jurnal West Law, ABA Journal., 1995, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diterjemahkan melalui Google Translate

Dodi Haryono dan Yonari Utama, “perbandingan Hukum Pemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” , BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm.42.

Mexsasai Indra, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. 4, No. 3 September- Agustus 2015, hlm.139

C. Website dan Kamus

Kamus Hukum, 2005, Andi Hamzah, Ghalia Indonesia

Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung <https://riaupos.jawapos.com/riau/17/06/2016/201614/pemkab-akan-tertibkan-penangkaran-walet-berpotensi-datangkan-pa>, diakses, tanggal 2 Januari 2021

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.